

**PROFITABILITAS DAN EFISIENSI USAHA TERNAK AYAM BROILER
DI TASIKMALAYA JAWA BARAT
(TINJAUAN KHUSUS DAYA SAING DAN KEELJAKAN PEMERINTAH)**

**PROFITABILITY AND EFFICIENCY OF BROILER INDUSTRY IN TASIKMALAYA
WEST JAVA**

Agus Santosa

Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta

Unang Atmaja

Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi Bandung

ABSTRACT

The key priority of the Indonesian government as far as the livestock sector is concerned is the expansion of the poultry industry, in particular the broiler industry. Policy makers see the broiler industry as an important source of animal protein since in comparison with cattle poultry are efficient converters of feed grains into meat.

The research area is Tasikmalaya, as is considered to be a potential broiler production area that develops better among regions in the West Java. This study is focused on broiler business pattern, both partnerships and autonomous, using the profitability and efficiency to measure the tingkat of cooperative advantage.

Policy Analysis Matrix (PAM) based on primary data were constructed for the different pattern of production system. Scale of production was also taken into account. The larger were farmers who exerted more than 2000 heads per production cycle.

The study find that broiler production in Tasikmalaya is an efficient industry and can exist without any protection. The partnership and the larger farmers enjoy more profit relative to the autonomous and the smaller ones. Tingkat of efficiency and profitability are influenced by production factor prices of feed and DOC as well as broiler. Other finding is that government plan to set 80% imported tariff on chicken leg quarter (broiler part) can not avoid yet to makes the domestic product of broiler less competitive in the domestic market.

Key Words: efficiency, profitability, competitive advantage

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Ayam broiler merupakan suatu jenis ayam domestik yang penting, terutama karena mengandung nutrisi sebagai sumber makanan. Indonesia merupakan satu di antara banyak negara yang menjalankan bisnis ayam broiler dengan tujuan untuk penyediaan sumber makanan dan merupakan agrobisnis penting bagi pasar domestic dan ekspor.

Bisnis ayam broiler di Indonesia, sebagaimana dicatat oleh majalah Buletin Agroekonomi(2000), mulai dilakukan tahun 1960. Tahun 1970, dengan diperkenalkannya investasi asing dalam bidang industri makanan, tempat penetasan, DOC, dan bahan kimia. Bisnis ayam broiler menjadi bisnis agroindustri yang penting dalam penyediaan lapangan kerja, bertambahnya pendapatan dan sebagai sumber makanan dan telur. Selain itu, bisnis ini menjadi kekuatan pengendali bagi ekonomi pedesaan. Saat ini, usaha pembesaran ayam broiler begitu populer, dan bukan hal yang mengejutkan jika saat ini menjadi idola peternakan masyarakat Indonesia. Telah berjalan selama 20 tahun setelah pertama kali dibentuk tahun 1976, seperti dilaporkan oleh Yusmichad Yusdja (1997), produksi daging broiler telah menjadi sumber potensial kebutuhan daging nasional. Data statistik peternakan(1995) menunjukkan bahwa peran broiler, sebagai sumber produksi daging adalah sebesar 62% dari produksi total daging nasional. Pertumbuhan produksi ayam broiler masih berkisar di atas 20% per tahun sampai mencapai titik antikleimaks 1993/1994 dengan tingkat pertumbuhan masih berada di atas 12%.

Pertumbuhan dalam industri ayam broiler mulai menurun hingga 50 - 60% setelah krisis ekonomi dan krisis moneter tahun 1997 hingga 1999(Buletin Agroekonomi, 2000). Penurunan drastis telah mempengaruhi lini industri ayam broiler lainnya seperti pertanian, industri makanan, para peternak, dan mereka-mereka yang terkait dengan lembaga-lembaga di atas dalam bidang pemasaran.

Strategi dan kebijakan pengembangan sektor pertanian, dan khususnya sub-sektor hewan domestik(peternakan) yang telah dipelopori dalam 6 dari Rencana Pembangunan Lima Tahun, melalui pendekatan pengembangan agro-industri yang berorientasi pasar, sangat kompetitif, kompetisi berbasis keuntungan, dan natural, masih relevan dan harus diberikan dukungan. Berbagai kebijakan seperti subsidi bahan produksi, pinjaman lunak, dan proteksi pada produk yang sama, dilakukan untuk mendorong peternak untuk meningkatkan produksi, hanya bersifat sementara. Kebijakan-kebijakan peningkatan produksi tersebut ditujukan untuk mengurangi impor ketergantungan bahan mentah yang saat ini terjadi. Kemudian, upaya untuk meningkatkan produksi hendaknya difokuskan melalui perbaikan teknologi dan pembentukan suasana yang kondusif bagi investasi.

Keterlibatan pemerintah dalam agroindustri ayam broiler dilakukan melalui keputusan pemerintah. Sejak tahun 1980, pemerintah Indonesia telah merencanakan bahwa industri ayam broiler dianggap sebagai agrobisnis skala kecil, sebagaimana tertera dalam keputusan pemerintah(Keppres) No. 50/81, yang menyatakan bahwa tiap peternak membesarkan tidak lebih dari 5000 ekor ayam, atau 750 ayam broiler tiap periode produksi, dan usaha dalam skala besar tidak diijinkan (Yusdja dan Pasandaran, 1999). Keputusan pemerintah tersebut ternyata tidak efisien, dan deregulasinya muncul dengan Keppres no. 22/70

yang mengizinkan pembesaran sebanyak 15.000 ekor ayam dan 2500 ayam broiler tiap periode produksi. Keppres juga mengizinkan bisnis skala besar untuk beroperasi entah dengan investasi lokal maupun investasi asing, dalam kondisi dimana produksi adalah untuk ekspor dan dengan melibatkan industri skala kecil dalam pola rekanan (Saptana dan Suhartini, 1995; Amirudin Syam, 1998; Yusdja dan Pasandaran, 1999). Guna memberi semangat, tahun 1980 hingga 1984 pemerintah terus memperkenalkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan pada teknik budidaya dan pemasaran untuk menghilangkan kekuatan pasar dan menjaga bisnis masyarakat peternak. Makna persekutuan atau kolaborasi antara industri skala besar dan kecil adalah bahwa skala besar menyediakan modal kerja dan investasi dan penjualan produk dari yang kecil, dan melalui hal itu diharapkan bahwa bisnis akan lebih berkembang. Sebenarnya, pada saat industri kecil mulai berkembang, secara bertahap industri ini mulai menjadi bisnis skala besar (Yusmichad Yusdja dan Effendi Pasandaran, 1999).

Di masa mendatang, campurtangan pemerintah dalam bisnis hendaknya dikurangi demi kepentingan kekuatan dan otonomi industri, yakni mampu menghadapi kondisi perdagangan bebas tanpa bantuan pemerintah, karena dalam kondisi perdagangan bebas berbagai aktivitas ekonomi secara otomatis akan bergeser ke daerah dimana kekuatan birokrasi tidak terlalu kuat dan biaya sosialnya lebih murah.

Kita akan mengalami era perdagangan bebas, dan Indonesia harus bersiap-siap, dan pengaruhnya telah ada seperti munculnya produk makanan hewani luar negeri (daging sapi, daging broiler dan susu). Dan kemunculan ini akan mengejutkan produksi hewan domestik. Isu terakhir adalah tentang rencana pemerintah untuk memperkenalkan *chicken leg quarter* (CLQ) atau paha ayam sebagaimana terdapat pada keputusan pemerintah no.230/MPP/Kep/7/1997 tentang kebijakan ekspor dan impor. Rencana tersebut dikeluarkan karena adanya kecemasan kuat dari para pemegang saham industri broiler dan mereka menganggap bahwa pemerintah AS menerapkan politik buangan. Bahkan jika pemerintah Indonesia menetapkan tarif impor sebesar 80%, dianggap bahwa tarif tersebut tidak cukup menyamai kekuatan kompetisi dengan produk broiler lokal.

Paper ini mencoba untuk melihat bagaimana bisnis broiler menjadi lebih siap di rumah mereka sendiri (untuk berkembang). Daerah penelitian adalah di Tasikmalaya yang dianggap sebagai daerah produksi ayam broiler potensial yang perkembangannya lebih baik dibanding daerah lain di Jawa Barat. Menurut Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya, produksi ayam broiler di daerah tersebut sebesar 60 hingga 70 persen dipasarkan keluar Tasikmalaya untuk memenuhi permintaan pasar Jakarta. Studi ini difokuskan

pada pola bisnis, persekutuan, dan swadaya, menggunakan tingkat profitabilitas dan efisiensi guna mengukur tingkat kompetivitas.

Ada dua pola oprasi bisnis ayam broiler di Tasikmalaya, yakni bisnis swadaya dan persekutuan. Operasi bisnis swadaya menangani segala bentuk aktivitas dan persediaan bahan (makanan, unggas dan obat-obatan) mereka sendiri dan bebas membeli dan menjual input dan produk atau output yang dihasilkan. Operasi bisnis persekutuan menjalankan bisnis melalui kolaborasi dengan toko ternak(PS) tertentu. Persediaan bahan (makanan, unggas dan obat-obatan) dipasok oleh PS dan PS membeli produk atau output yang dihasilkan dalam bisnis.

TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengukur pengaruh kebijakan pemerintah saat ini dan yang diusulkan terhadap produksi broiler dan kemudian mengevaluasi dan mengukur apakah sistem produksi yang telah ada menguntungkan dan efisien secara ekonomi. Studi difokuskan pada evaluasi dua pola operasi bisnis broiler yang telah dikemukakan di atas.

METODE PENELITIAN

PEMILIHAN WAKTU DAN TEMPAT

Penelitian dilakukan di kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten ini dipilih sebagai kabupaten di Jawa Barat yang sangat potensial bagi industri broiler yang dikembangkan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Ada empat kecamatan di kabupaten ini yang dipilih dan memenuhi kriteria yakni jumlah populasi broiler dan jumlah peternak yang bergerak dalam industri ini. Empat kecamatan yang dipilih tersebut adalah kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Kawalu, dan Pagerageung.

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan. Dari bulan September hingga Oktober 2002, untuk mengumpulkan data tentang biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, pendapatan, dan laba.

METODE PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder dimana keduanya merupakan data kualitatif dan kuatitatif. Data primer dikumpulkan dengan cara rekaman langsung terhadap responden yang dipersiapkan dalam bentuk pertanyaan catatan tentang input dan output, serta biaya dan pendapatan selama satu masa produksi bulan Juli, Agustus, atau September 2002.

Para peternak yang diwawancarai adalah sebanyak 10 persen dari 4 kecamatan yang menggunakan pola swadaya dan persekutuan baik pada pemilik dan/atau operator. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel peternak swadaya yaitu (1)memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam industri broiler, (2)melakukan pembesaran ayam yang dimulai bulan Juli 2002.

Data primer yang diperlukan pada tingkat peternak adalah volume produksi/operasi, biaya operasi, pendapatan dan laba bersih. Biaya operasional pada tingkat peternak adalah biaya peralatan, perlengkapan dan biaya bahan yakni kandang, sewa tanah, baki makanan, tempat minum, alat pemanas, listrik, minyak gas, makanan, DOC, tempat sampah, bahan kimia dan vitamin, serta pekerja.

Data primer yang diperlukan pada tingkat pedagang atau toko ternak (PS) dan pemotong (penyembelih) adalah volume penjualan dan pembelian, biaya operasional, pendapatan dan laba. Biaya operasional mencakup biaya transportasi, tenaga kerja, dan biaya peralatan. Data sekunder sebagai data pelengkap diperoleh dari Biro Pusat Statistik, Departemen Pertanian, Direktorat Jendral Pertanian, Biro Peternakan, perikanan dan kelautan Tasikmalaya serta berbagai literatur lain.

METODE ANALISIS DATA

Untuk berbagai tujuan, Policy Analysis Matrix(PAM) yang diperkenalkan oleh Monke dan Pearson (1989) digunakan sebagai alat analisis. Alat analisis ini dijelaskan secara singkat pada Bab II. Setelah data input dan output, baik data pribadi maupun data sosial dari peternak, pemotong, maupun pedagang, diperoleh, biaya komponen-komponen(input) dialokasikan atau dikelompokkan kedalam biaya domestik (tidak dapat diperdagangkan) dan biaya asing(dapat diperdagangkan) serta disusun dalam bentuk matrik. Matrik PAM ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Policy Analysis Matrix(PAM)

Revenues		Costs		Profits
		Tradable inputs	Domestic factors	
Harga Swasta	A	B	C	D ¹
Harga Sosial	E	F	G	H ²
Divergences	I ³	J ⁴	K ⁴	L ⁵
¹ Keuntungan Swasta, D = B-C ² Keuntungan Sosial, H = F-G ³ Output transfers, I = A-E		⁴ Factor transfers, J = B-F ⁵ Net transfers, L = D-H, or L = I-J-K		

Sumber: Monke dan Pearson (1995)

Komponen-komponen biaya domestik (tidak dapat diperdagangkan) dan biaya asing (dapat diperdagangkan)

Komponen-komponen input dalam peternakan ayam broiler di Tasikmalaya adalah makanan, DOC, vitamin, dan bahan kimia, pekerja, serta bahan operasi seperti baki makanan, tempat minum, alat pemanas, listrik, minyak tanah, kandang dan sewa tanah. Data input dikelompokkan dalam dua kelas, input yang dapat diperdagangkan dan input domestik. Input yang dapat diperdagangkan adalah input yang bisa meraih pasar internasional dan input yang tak dapat diperdagangkan atau input domestik adalah input yang dihasilkan dan dikonsumsi secara domestik (Gittinger, 1982).

Input yang dapat diperdagangkan yaitu makanan, bahan kimia dan vitamin, DOC dan minyak tanah. Dan input domestik yakni kandang, pekerja, bahan baku, bunga modal, dan pajak.

PENENTUAN HARGA SOSIAL

HARGA SOSIAL OUTPUT

Nilai sosial atau harga kesamaan ayam broiler dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari industri peternakan yang dipresentasikan oleh USDA, 2002.

HARGA SOSIAL INPUT

Harga sosial makanan dan DOC adalah biaya asuransi dan angkutan (cif) normal yang digandakan oleh nilai tukar asing (SER) karena orang Indonesia pada posisinya sekarang cenderung mengimpor bahan-bahan tersebut. Namun kebijakan nilai tukar Indonesia dianggap diatur dengan baik, sehingga tidak ada perbedaan antara nilai tukar asing aktual dengan tingkat pertukaran sama rata.

Biaya sosial minyak tanah dihitung dengan menambahkan nilai subsidi sebesar 30,4% untuk minyak tanah. Jadi nilai ini dipertimbangkan sebagai nilai tanpa subsidi.

Biaya sosial pekerja dalam pasar bebas ditentukan dengan menghitung nilai marginnya, yakni bahwa nilai harus sama dengan nilai pertambahan produksi dari pekerja yang ditambahkan (Gittinger, 1986). Akan tetapi, hal ini hanya berpengaruh di dalam negeri dimana buruh didapat. Undang-undang tentang persaingan bursa pekerja di Indonesia telah dibuat oleh Heytons (1991) dimana bursa pekerja beroperasi dengan efisiensi yang beralasan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang diasumsikan antara biaya buruh swasta dan sosial dalam analisis.

Tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung modal kerja dan biaya perbaikan modal mempunyai perbedaan dalam biaya swasta dan sosial. Tingkat bunga swasta aktual (i_p) dihitung dari tingkat bunga nominal (r) yakni 18% dan tingkat inflasi (f) adalah sebesar 10%. Rumusnya sebagai berikut :

$$i_p = \frac{(1+r)}{1+i} = -1$$

Kalkulasi biaya perbaikan modal tiap kandang dan perlengkapan adalah berdasarkan informasi tentang pengembalian modal dari investasi. Biaya ini meliputi biaya pembangunan kandang, dan biaya pembelian perlengkapan, nilai kegunaan kandang dan barang didalamnya. Biaya bersih adalah biaya awal dikurangi nilai barang yang terdapat didalamnya. Nilai guna kandang diperkirakan selama 10 tahun, sedang untuk alat pemanas dan peralatan lain diperkirakan tahan selama 5 dan 3 tahun.

Biaya bersih adalah biaya awal dikurangi nilai barang yang ada saat ini. Biaya perbaikan tahunan adalah produk tingkat perbaikan dan biaya bersih.

LANGKAH-LANGKAH ANALISIS DATA

Dibuat tabel anggaran untuk melakukan analisis data. Langkah pertama yaitu data input maupun output *dikalibrasi* untuk 1000 broiler yang dibesarkan guna memastikan ketepatan hitungan atau perbandingan sistem-sistem produksi yang berbeda.

Perbedaan teknis dari sistem pembesaran dalam penelitian ini adalah sistem swadaya dan persekutuan. Kemudian kedua kelompok di atas dikelompokkan, berdasarkan skala bisnis, menjadi kelompok yang membesarkan kurang dari 2000 ekor dan yang lebih dari 2000ekor. Dengan cara di atas, akan ada dua PAM bagi tiap sistem pembesaran broiler dan total ada 4 PAM, sebagai berikut:

1. Swadaya dengan skala pembesaran kurang dari 2000 ekor
2. Swadaya dengan skala pembesaran lebih dari 2000 ekor
3. Persekutuan dengan skala pembesaran kurang dari 2000 ekor
4. Persekutuan dengan skala pembesaran lebih dari 2000 ekor

HASIL DAN PEMBAHASAN

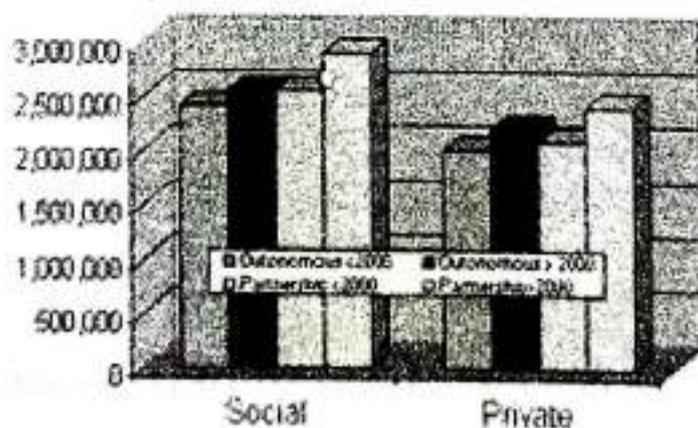
PENGARUH POLA SISTEM PRODUKSI YANG BERBEDA TERHADAP PROFITABILITAS DAN EFISIENSI

PROFITABILITAS SWASTA

Analisis data menunjukkan bahwa secara finansial, baik pola swadaya maupun persekutuan adalah menguntungkan (profitable). Dan secara ekonomi, industri pembesaran ayam broiler di Tasikmalaya sangat efisien sebagaimana ditunjukkan dengan nilai positif pada kolom H pada tabel PAM.

Dengan membandingkan kedua pola tersebut, ditemukan bahwa perbedaan antara pola swadaya dan persekutuan adalah signifikan. Pada skala produksi yang sama, untuk produksi kurang dari 2000 ekor ayam, peternak dengan pola persekutuan mendapat untung sebesar 9.59% lebih tinggi dibanding dengan para peternak yang menggunakan pola swadaya (lihat Gambar 5.3). Serta untuk produksi lebih dari 2000 ekor, pada pola persekutuan petani untung 16% lebih tinggi jika dibanding dengan mereka yang menerapkan pola swadaya. Keuntungan yang diperoleh pada skala yang berbeda menunjukkan bahwa petani dengan produksi lebih dari 2000 ekor ayam baik dengan pola swadaya maupun persekutuan lebih tinggi daripada peternak yang hanya membesarkan ayam kurang dari 2000 ekor, 23.52% dan 30.93% untuk pola swadaya dan pola persekutuan secara berturut-turut.

Keuntungan(hasil bagi pengelola) yang diperoleh para peternak dengan menerapkan pola swadaya lebih kecil dibanding para peternak yang menerapkan pola persekutuan karena jumlah ayam broiler tidak memadai. Para peternak swadaya dengan skala produksi kurang dari 2000 ekor rata-rata hanya hidup sebanyak 950 ekor ayam, sementara para peternak yang menggunakan pola persekutuan rata-rata bisa membesarkan ayam sebanyak 1.549 ekor. Sehingga, biaya per ekor ayam(broiler hidup) lebih tinggi, khususnya biaya modal. Sementara itu, pembagian modal dari biaya total kecil(2.34%), perbedaan biaya modal yang dikeluarkan oleh peternak swadaya pada skala produksi kurang dari 2000 ekor adalah sebesar 20.71% lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh peternak persekutuan.



Gambar 5.3 Profitabilitas industri broiler dengan pola sistem produksi yang berbeda di Tasikmalaya

Tingkat ketahanan hidup broiler adalah masalah lain yang dihadapi oleh petani swadaya. Tingkat hidup ayam broiler peternak swadaya lebih rendah daripada peternak persekutuan karena kurangnya modal dan pengetahuan teknik. Para petani persekutuan menerima bantuan vaksin, vitamin, dan bantuan teknik dari toko ternak (PS) sebagai partner dimana hal itu tidak diterima oleh peternak swadaya.

PROFITABILITAS SOSIAL

Keuntungan sosial mengukur efisiensi atau keuntungan komparatif. Ketika keuntungan sosial negatif, suatu sistem tidak akan dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah.

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 5.1, terlihat bahwa semua daerah efisien dan mempunyai keuntungan komparatif yang tinggi dalam DRC, domestic resource cost ratio (tingkat biaya sumber domestik), kurang dari 1, yakni antara 0.21 sampai 0.24. Aturannya yakni meminimisasi DRC setara dengan maksimisasi keuntungan sosial. DRC terendah (0.21) dicapai oleh peternak yang menerapkan pola persekutuan.

PENGARUH PERUBAHAN INPUT YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN TERHADAP PROFITABILITAS DAN EFISIENSI

Bab ini membahas sejumlah profitabilitas perubahan biaya input yang dapat diperdagangkan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi dan profitabilitas industri pembesaran broiler. Hal ini disebabkan karena biaya DOC dan biaya makanan adalah faktor paling dominan dalam industri pembesaran broiler, analisis akan memfokuskan pada faktor tersebut dan pada kemungkinan perubahan biaya output, harga broiler pada tingkat peternak. Berbagai kemungkinan perubahan yang digunakan dalam analisis sensitivitas adalah sebagai berikut:

Skenario 1: harga DOC sama dengan harga efisiennya, yang lain konstan,

Skenario 2: harga DOC dan makanan sama dengan harga efisiennya, yang lain konstan,

Skenario 3: harga broiler sama dengan harga efisiennya, yang lain konstan,

Skenario 4: harga DOC, makanan, dan output (broiler) sama dengan harga efisiennya, yang lain konstan.

PENGARUH PERUBAHAN HARGA DOC TERHADAP PROFITABILITAS SWASTA

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa harga DOC selama penelitian menjadi beban dan dianggap terlalu mahal sehingga menurunkan keuntungan para peternak atau bahkan membuat peternak merugi. Dengan harga DOC Rp

2,800 per ekor, para peternak masih menerima keuntungan karena harga broiler yang relatif baik.

Tabel 2 menunjukkan bahwa jika harga DOC setara dengan harga efisiennya, Rp 1.800, maka petani akan dapat menambah pendapatan mereka sebesar 89.56%. Pertambahan pendapatan tertinggi akan diterima oleh petani swadaya dengan skala produksi kurang dari 2000 ekor yakni lebih dari 100%. Jelas bahwa penurunan harga DOC akan membantu peternak yang lebih kecil.

Setelah pendapatan produsen bertambah, maka subsidi yang ditransfer akan dikurangi dengan rata-rata 71.93%. subsidi yang transfer sebelumnya, sebesar Rp 1.431.976, berkurang Rp 104.986, akibat penurunan harga DOC. Akibat penghapusan ketidakefisienan pada pasar DOC, biaya produksi daging broiler berkurang kira-kira 13.55 %.

Tabel 2. Pengaruh perubahan harga DOC terhadap Profitabilitas swasta

Sistim Produksi	Current Price (Rp. 2800)	Estimated Efficiency Price (Rp. 1800)	Increasing Income (%)
Mandiri			
<2000	972,156	2,003,735	106.11
>2000	1,200,810	2,208,973	83.96
Kemitraan			
<2000	1,065,340	2,084,707	95.68
>2000	1,394,851	2,406,142	72.50

Kombinasi perubahan harga input dominan, DOC dan makanan yang dapat diperdagangkan, setara dengan harga sosial mereka yang memberikan pendapatan signifikan tambahan bagi produsen. Akan tetapi, ini dibawah pendapatan yang diperoleh ketika terjadi pertambahan harga DOC, karena harga makanan lokal selama penelitian adalah 8.5% kurang dari harga makanan dunia.

Tabel 3 menunjukkan bahwa setelah harga DOC menurun pada harga efisiennya dan peningkatan harga makanan pada harga efisiennya maka pendapatan peternak akan meningkat rata-rata sebesar 45.90%. Peningkatan tertinggi, 55.85%, dicapai oleh para peternak swadaya dengan skala produksi kurang dari 2000 ekor. Pendapatan peternak sebelumnya, sebesar, Rp 972.156, meningkat menjadi Rp 1.515.098 per 1000 ekor/produksi.

Tabel 3. Pengaruh perubahan harga input yang dapat diperdagangkan terhadap profitabilitas swasta

Sistim Produksi	Harga Langsung (Rp. 2800; Rp. 2300)	Perkiraan Efisiensi harga (Rp. 1800;Rp. 2515)	Peningkatan Pendapatan (%)
Mandiri			
<2000	972,156	1,515,098	55.85
>2000	1,200,810	1,726,804	43.80
Kemitraan			
<2000	1,065,340	1,577,475	48.07
>2000	1,394,851	1,895,184	35.87

PENGARUH PERUBAHAN HARGA BROILER HIDUP TERHADAP PROFITABILITAS SWASTA

Output yang dapat diperdagangkan, sebagaimana tertera pada tabel PAM, menunjukkan perbedaan negatif pada semua pola pembesaran broiler. Tabel tersebut menunjukkan bahwa harga broiler dunia lebih tinggi daripada harga pasar lokal. Hal ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat dan kelebihan pasokan pada masa panen.

Data menunjukkan bahwa harga broiler sangat berubah-ubah. Jika diasumsikan bahwa harga ayam sama dengan harga ayam dunia dan faktor-faktor lain konstan, maka pendapatan peternak di Tasikmalaya akan menjadi 79.82 hingga 10,.45% lebih tinggi.

Tabel 4. Pengaruh Perubahan Harga Ayam Hidup Terhadap Pendapatan Peternak Ayam Broiler

Sistem Produksi	Harga langsung (Rp. 7800)	Perkiraan Efisiensi Harga (Rp. 8573)	Peningkatan Pendapatan (%)
Mandiri			
<2000	972,156	1,968,105	102.45
>2000	1,200,810	2,209,181	83.97
Kemitraan			
<2000	1,065,340	2,106,819	97.76
>2000	1,394,851	2,466,345	76.82

PENGARUH PERUBAHAN HARGA INPUT DAN OUTPUT YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN TERHADAP PROFITABILITAS SWASTA

Jika semua faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan efisiensi setara dengan harga efisien dan diikuti dengan peningkatan output dunia maka situasi yang digambarkan pada Tabel 5 akan tercapai. Tabel menunjukkan bahwa perubahan faktor produksi, DOC, makanan, dan output, setara dengan harga efisiennya sehingga suatu peningkatan profitabilitas yang signifikan akan terwujud. Semua daerah yang melakukan pembesaran broiler akan meningkat rata-rata sebesar 136%. Peningkatan profitabilitas akan tercapai jika faktor penyimpangan pasar harga DOC, makanan, dan output dihilangkan.

Tabel 5. Pengaruh perubahan harga input (DOC dan makanan) dan output yang dapat diperdagangkan terhadap profitabilitas swasta

Sistem Produksi	Harga Langsung (Rp. 2800;Rp. 2300) (Rp. 7800)	Perkiraan Efisiensi harga (Rp.1800;Rp. 2515) (Rp. 8573)	Peningkatan Pendapatan
Mandiri			
<2000	972,156	2,511,047	158.30
>2000	1,200,810	2,735,174	127.78
Kemitraan			
<2000	1,065,340	2,618,954	145.83
>2000	1,394,851	2,966,677	112.69

PENGARUH PENENTUAN TARIF IMPOR PAHA AYAM (CLQ) TERHADAP PERSAINGAN INDUSTRI BROILER

Sebagaimana telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa masalah yang dihadapi oleh para peternak ayam broiler di Indonesia adalah rencana Konsulat Amerika untuk memperkenalkan paha ayamnya di Indonesia. Dan pemerintah Indonesia menegelaurkan keputusan no 230/MPP/Kep/7/1997 tentang ekspor dan impor yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengizinkan impor paha ayam dan menentukan tarif sebesar 80%, yang lebih tinggi dibanding tarif yang ditentukan oleh WTO, 40% untuk menjaga peternak domestik.

Tarif yang diusulkan atau ditentukan oleh pemerintah tersebut ditolak oleh GAPPI karena dianggap tarif tersebut tidak tepat untuk menjaga peternak domestik. Harga CLQ berkisar antara \$ 0.3 hingga \$0.4 per kg, dan dianggap terlalu murah dibanding harga broiler lokal. Ini karena masyarakat Amerika lebih suka mengkonsumsi bagian dada daripada CLQ. Di negara tersebut, harga dada ayam \$2.5 sampai \$3.0 per kg dimana peternak bisa mengambil

keuntungan hanya dari bagian tersebut. Maka dari itu, GAPPI mengusulkan tarif impor bagi CLQ sebesar 120%.

Untuk menemukan pengaruh keputusan pemerintah terhadap harga broiler dapat dilakukan dengan pendekatan analisis *Nominal Protection Coefficient on Output*(NPCO) atau *Nominal Protection Ratio on Output*(NPRO) dan *transfer output*(OT). Dan untuk menentukan tarif impor yang dapat menjaga industri broiler atau peternak domestik ada sejumlah skenario tarif impor alternatif yang diajukan(lihat Tabel 6).

Analisis menunjukkan bahwa proteksi melalui penentuan tarif impor sebesar 80% oleh pemerintah tidak tepat, sebagaimana ditunjukkan dengan nilai NPCO dan NPRO, berturut-turut sebesar 1.59 dan 59. Nilai di atas menunjukkan bahwa harga yang diterima oleh produsen lokal 159% lebih tinggi dari pada harga impor dimana dengan situasi tersebut produk lokal kurang kompetitif dibanding produk impor. Konsumen domestik akan lebih suka produk impor dan akan menghemat 59% dari uang mereka.

Tabel 6. Alternatif-alternatif tarif import CLQ

Tarif Impor	NPCO	NPRO
0%	3.59	259
40%	2.21	121
80%	1.59	59
120%	1.25	25
160%	1.02	20
165%	1.00	00
200%	0.87	(13)

Dan agar para produsen broiler lokal dapat bersaing secara fair dengan produsen asing(diasumsikan bahwa harga CLQ adalah harga kotor) maka harga CLQ harus sama dengan harga ayam broiler lokal atau nilai NPCO dan NPRO = 1.00(satu) dan 0 (nol). Dan nilai NPCO dan NPRO tersebut dapat diperoleh jika tarif impor ditetapkan sebesar 165%. Disini, CLQ yang dibandingkan dengan broiler lokal(semua bagian) menganggap bahwa konsumen domestik mempunyai kesukaan yang sama entah dengan CLQ maupun broiler secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penemuan riset menunjukkan bahwa industri broiler di Tasikmalaya efisien dan secara ekonomi menguntungkan (profitable). Tingkat efisiensi dan

profitabilitas dipengaruhi oleh harga faktor produksi makanan dan DOC sebagaimana broiler. Berbagai kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

1. Industri broiler di Tasikmalaya secara finansial (swasta) dan secara ekonomi(sosial) bisa berkembang dan memiliki berbagai keuntungan kompetitif bagi ekspor.
2. Penyimpangan pasar khususnya bagi DOC mengakibatkan penurunan pendapatan peternak dan keuntungan konsumen.
3. Pola persekutuan memberikan profitabilitas dan efisiensi yang lebih baik dibanding pola swadaya.
4. Skala produksi yang lebih besar memberi keuntungan dan efisiensi yang lebih tinggi.
5. CLQ Impor membuat produk broiler lokal kurang kompetitif pada pasar domestik dan memperlemah eksistensi industri broiler Indonesia.

Untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi para peternak ayam broiler di Tasikmalaya hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pemerintah perlu proaktif untuk memotong ketidakefisienan pemasaran faktor produksi, khususnya DOC, dan persoalan undang-undang anti monopoli.
2. DOC memerlukan investasi harga yang sesuai untuk membangun peternakan lokal yang dikelola oleh peternak lokal.
3. Program perluasan sangat diperlukan terutama bagi para peternak swadaya untuk menurunkan tingkat kematian.
4. Para peternak hendaknya dimudahkan dengan kredit lunak.
5. Tarif impor CLQ perlu ditetapkan dan demi menjaga industri broiler Indonesia, tarif hendaknya ditetapkan sebesar 165%, menurut hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin Syam. 1998. Analisis sistem agribisnis ayam ras broiler di Jawa Barat (Kasus di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya). Dalam Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian, PPSE Pertanian, Badan Litbang Pertanian Departemen Pertanian.
- Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya. 2001. Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2000.
- Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya. 2002. Database Peternakan Tahun 2000-2001.

- Heytens, Paul. 1991. Policy alternatives for future rice production growth. Rice Policy in Indonesia. Cornell University Press. Ithaca.
- Gittinger. J. Price. 1982. Economic Analysis of Agricultural Projects, 2d. ed. Johns Hopkins University Press. Baltimore.
- Made Oka Adnyana dan Ketut Karyasa. 1999. Dampak Era globalisasi terhadap usaha ternak sapi perah: Kajian Peluang, Kendala dan Strategi Pengembangan. *Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian*. Buku 1. Pusat penelitian Sosial Ekonomi pertanian. Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Monke, A. Eric and Scot R. Pearson. 1989. The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. Cornell University Press. Ithaca and London.
- Rofatin, B. 2001. Perbedaan tingkat Risiko Usaha Ternak Ayam Broiler (Pedaging) dan Ayam Jantan Tipe Petelur (Pejantan) Serta Faktor-Faktor yang mempengaruhinya (Kasus Pada Poultry Shop Tanjung Mulya Kabupaten Ciamis). Thesis. Pasca Sarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Soehadji. 1994. Tinjauan aspek perundang-undangan dalam pembangunan agribisnis peternakan yang tangguh menghadapi era pasar bebas. Makalah disampaikan pada seminar nasional Tinjauan aspek perundang-undangan peternakan. Bogor 27 September 1995. Ditjen Peternakan, Jakarta.
- Whendrato dan I M Madyana. 1992. *Budidaya Ayam Buras*. Eka Offset. Semarang.
- Yusdja, Y dan Effendi Passandaran. 1999. Analisis harga pokok dan bentuk pasar pakan dan kaitannya dengan pengembangan agribisnis ayam ras rakyat. *Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian*. Buku 1. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.